



A-N-T-I

ALIANSI NASIONAL TIMOR LESTE BA TRIBUNAL INTERNASIONAL
(Timor-Leste National Alliance for an International Tribunal)

Tel: +670 77432621 | 77372095 | 78474876 | 78164385

maubere81@gmail.com | ixavier@asia-ajar.org | josem@jsmp.tl | jhano.hak@gmail.com

**Kami dengan tegas melawan impunitas:
Menolak dengan tegas terdakwa Prabowo Subianto kembali berkuasa**

Pengantar

Kami mengikuti secara seksama dengan keprihatinan yang serius atas perkembangan dan perubahan politik yang sedang berlangsung di Indonesia, secara khusus fenomena para kandidat atau calon presiden (capres) yang akan bersaing di pemilu pada tahun 2024 mendatang. Kami mengikuti dengan berbagai macam perasaan 'shock', sedih dan sangat terpukul karena diantara para figur kandidat yang sama – yang selama ini kami, para korban dan keluarga kekerasan dan pembantaian dan kejahatan kemanusiaan yang kami suarakan berkali-kali atas kejahatan yang dilakukan akan kembali ke puncak kekuasaan seperti terdakwa mantan jenderal Prabowo Subianto.

Kami menghargai dan menghormati perkembangan politik dan demokrasi yang sedang berproses di Indonesia yang menunjukkan iklim yang sangat positif. Akan tetapi, kami merasa tuntutan hak atas keadilan dan luka dalam atas kekerasan dan kekejaman masa lampau tergores ketika kami melihat pelaku sekaligus terdakwa utama pelanggaran HAM berat di masa regim Soeharto kembali ke puncak kekuasaan dan mengambil alih posisi kunci dan strategik dalam pemerintahan. Mantan Jendral Prabowo Subianto yang saat ini sebagai Menteri Pertahanan Indonesia yang juga sebagai salah satu kandidat terkuat Presiden RI periode mendatang adalah terdakwa atas kasus kejahatan HAM berat

Apabila kami mengenang kembali peristiwa berdarah masa lalu, kami mengingat kembali peran mantan Jenderal Prabowo Subianto sebagai elemen kunci yang merancang peristiwa tragis, kejam/biadab dan tidak berprikemanusiaan dan pelanggaran HAM berat terorganisir dan sistematis selama pendudukan di Indoensia di Timor-Leste.

Selama dua dekade terakhir, para korban pelanggaran HAM dan keluarga mereka di Timor-Leste terus mendesak dan secara konsisten menantikan keadilan untuk para korban dan keluarga mereka termasuk mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mewujudkan keadilan bagi para korban.

Berikut adalah fakta-fakta keterlibatan mantan Jendral Prabowo Subianto

Fakta menunjukkan bahwa selama rezim Suharto berkuasa Prabowo Subianto terlibat dalam serangkaian kejahatan dan pelanggaran HAM di Timor-Leste seperti pembantaian yang terjadi pada tahun 1983 di Viqueque yang terkenal dengan peristiwa Kraras yang menelan korban 200 jiwa yang kemudian kota tersebut terkenal dengan nama "kota para janda" karena banyak dari suami para korban dibantai dalam peristiwa berdarah tersebut.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh CAVR, *Chega!* mencatat bahwa setidaknya 530 orang dibunuh oleh militer Indonesia selama **operasi melawan-insurgensi** yang dijalankan pada tahun 1984, di semua wilayah Timor-Timur (Timor-Leste). Sementara ratusan orang lainnya diperkirakan meninggal karena kelaparan di kamp-kamp konsentrasi di sebuah bukit bernama Bibileo di berbagai daerah lainnya.

Dalam laporan yang sama *Chega!* melaporkan bahwa kegiatan kampanye dan aksi pasukan Kopassandha/Kopasus adalah sebuah pasukan militer yang dipimpin langsung oleh Prabowo yang bertanggungjawab atas peristiwa-peristiwa terkait dengan tingkat pelanggaran dan kejahatan terbesar yang pernah terjadi dalam sebuah survei antara tahun 1983 dan 1984. Selama masa pendudukan, Satuan Kopasus mengambil peran penting dalam pembentukan milisi yang berkerja untuk militer Indonesia hingga tahun 1999. Pembentukan milisi pro Indonesia sebagai produk dari Prabowo dan Kopasus.

Selain itu, terdapat bukti kuat keterlibatan Prabowo selaku penanggungjawab dan pelaku intelektual atas peristiwa berdarah atau yang terkenal dengan pembantaian St. Cruz, 12 November 1991 yang menurut laporan Amnesty International menewaskan sekurang-kurangnya 300 orang lebih yang pada saat itu sedang melakukan demonstrasi secara damai di St. Cruz. Dugaan ini berdasarkan pada fakta bahwa sebelum peristiwa pembantaian tersebut Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Markar Batalion Kostrad 303 di Liquintai, Taibesi.

Sementara itu, di Indonesia, Prabowo Subianto dituduh terlibat dalam berbagai aksi penculikan dan penghilangan paksa terhadap mahasiswa pada tahun 1997-1998 dan serangkaian kejadian selama diktator Suharto dalam tahtak kekuasaan.

Berdasarkan pada fakta-fakta sejarah pahit dan kelam tersebut, kami, aliansi organisasi masyarakat sipil, para penyintas, korban dan keluarga korban yang bernaung dalam **Aliansa Nasional ba Tribunál Internasional** (ANTI), ingin menyampaikan sikap dan tuntutan kami sebagai berikut:

1. Kami menghimbau dan mendesak para pemilih di Indonesia, mahasiswa dan semua elemen masyarakat sipil pro demokrasi yang berjuang untuk mempromosikan dan memperkuat demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia; untuk bersatu dengan masyarakat korban, para penyintas, keluarga korban yang dibantai di Timor-Leste untuk **tidak** memberikan suaranya ke Mantan Jenderal Prabowo Subianto sebagai pelaku kriminal atas kejahatan kemanusiaan di Timor-Leste sebagai Presiden Republik Indonesia mendatang;

2. Kami sebagai masyarakat korban, penyintas dan korban pembantaian dan korban pelanggaran HAM di Timor-Leste, mendesak masyarakat modern dan beradab, para intelektual, dan semua elemen masyarakat Indonesia untuk mempertimbangkan suara korban atas keadilan untuk menuntut pertanggungjawaban politik dan keadilan atas para pelaku utama dan pelaku intelektual yang terlibat dalam merancang kekejaman dan pelanggaran HAM di Timor-Leste untuk tidak kembali berkuasa;
3. Kami mendesak masyarakat internasional untuk menekan dan menuntut para petinggi pro demokrasi dan pembela hak-hak asasi manusia di Indonesia untuk dengan tegas dan konsisten mencegah para pelaku pelanggar HAM untuk kembali berkuasa agar menghindari potensia pelanggaran HAM di masa depan dan menegakan proses berdemokrasi di Indonesia;
4. Mendesak Dewan Keamanan PBB untuk secara konsisten dalam memberantas impunitas, berdasarkan pada fakta tuduhan atas keterlibatan mantan Jenderal Prabowo Subianto dalam berbagai pelanggaran HAM di Timor-Leste dan di Indonesia. Kami mendesak untuk menggunakan cara-cara yang efektif untuk memastikan para pelaku kejahatan dan pelanggaran HAM bertanggungjawab atas tindakannya secara kredibel, terutama mantan Jendral Prabowo Subianto dan para pelaku lainnya;
5. Untuk Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor-Leste agar memperkuat dan mempromosikan prinsip demokrasi melalui upaya melawan impunitas dan menjalin hubungan kerjasama atas dasar penghargaan terhadap nilai-nilai HAM dan Negara Hukum. Oleh karena itu kami mendesak dan berdiri bersama masyarakat Indonesia untuk **TIDAK MEMBERIKAN TEMPAT** dan kepercayaan kepada seorang pelaku kejahatan besar atas kemanusiaan seperti Prabowo Subianto untuk menduduki posisi penting dan kunci selaku Presiden RI;
6. Kami menghimbau kepada masyarakat internasional untuk mendorong setiap negara bertanggungjawab untuk menangkap mantan Jenderal Prabowo Subianto atas kejahatan kemanusiaan yang didakwakan kepadanya.

Dili, 06 November 2023